

RABU, 19 JANUARI 2011

14 SHAFAR 1432 H

NOMOR 15 / TAHUN KE-19

Rp 2.900 / 28 Halaman

LUAR P. JAWA Rp 4.000 DITAMBAH ONGKOS KIRIM

MAHAKA MEDIA

IKLAN: Telp: 021 791 84744, Faks: 021 798 1169,  
e-mail: iklan@republika.co.id  
SIRKULASI: Telp 021 791 84746 Faks: 021 791  
98442 e-mail: sirkulasi@republika.co.id



## Kalau Terbuka, Takut Polemik

Oleh Rahmat Santosa Basarah

Terdapat beberapa detik jeda waktu antara rampungnya sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pernyataan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, Senin (17/1) malam, di aula Istana Negara.

Di layar televisi tampak ada sedikit 'kebingungan', dengan suasana hening pada jeda waktu beberapa detik tadi, ketika pertemuan antara pemerintah dan tokoh lintas agama itu berlangsung. Belakangan diketahui, saat Din akan menyampaikan pernyataan di dalam forum itu, puluhan wartawan yang sudah sejak awal berada di dalam ruangan, diminta untuk keluar.

Tak hanya dari aula, tapi dari gedung Istana Negara. Praktis siaran langsung dari dua stasiun televisi pun diputus. "Ini menjadi pertanyaan kami dan bahkan langsung disampaikan oleh Pak Din sebelum menyampaikan pandangan-pandangannya mengatasnamakan kami pada Presiden," tegas Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pendeta

Bersambung ke hlm 11 kol 1-7

**pro kontra**  
Baca selengkapnya di hlm 11

KH SALAHUDDIN WAHID TOKOH AGAMA

Kami Kritis Tapi tak Ngawur



Sikap para tokoh agama akan bagaimana terhadap pemerintah?

Akan tetap kritis dan bertanggung jawab. Tidak ngawur, menuduh yang macam-macam. Kita harus punya argumentasi yang kuat. Dan,

kalau tidak ada peristiwa sepekan lalu itu, kita tidak bertemu (Presiden) kayak Senin malam lalu kan? ■

DANIEL SPARRINGA STAF KHUSUS PRESIDEN

Respons Kami Lebih Agresif

Pertemuan Presiden dengan tokoh agama sebagai reaksi terhadap kritik?

Kami memang bertekad di tahun 2011 lebih agresif merespons masalah, menjemput bola, melibatkan elemen bangsa untuk menjadi bagian dari solusi. Apalagi ini tokoh agama yang sangat dihormati oleh Presiden SBY maka tidak ada alasan lain untuk menunda. Maka, itu jadi prioritas utama. Bapak Presiden bahkan menghopus beberapa agenda hanya untuk bertemu dengan tokoh agama itu. ■



## rehat

Mensos: Tren masalah sosial masih tinggi Lho, bukannya angka kemiskinan turun

Unpad mengaku sulit cari mahasiswa miskin Sudah pada drop out kali

# Tokoh Agama Kecewa



● Din Syamsuddin

DA'AN YAHYA/REPUBLIKA

Istana anggap tokoh agama tak satu suara.

JAKARTA — Tokoh lintas agama menganggap dialog tertutup yang digelar bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama sekitar 4,5 jam di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/1) malam, belum menyentuh akar dan substansi masalah.

Presiden dianggap lebih banyak menyampaikan pernyataan normatif. "Dialog cukup positif, hangat, tetapi belum mencakup substansi. Presiden begitu memesonakan dan normatif. Tapi, kami harapkan keinginan baik dan realisasinya," ungkap Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di Jakarta, Selasa (18/1).

Din termasuk salah satu tokoh lintas agama yang diundang SBY. Selain Din, hadir pula Ketua PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Andreas A Yewangoe, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus D Situmorang, Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Siti Hartati Murdaya, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) I Made Gde Erata, dan Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Budi S Tanuwibowo.

Bahkan, Din merasa kecewa dengan sikap Presiden yang enggan menyerahkan kasus Gayus HP Tambunan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengungkapkan, Presiden berdalih kasus ini sudah ditangani Polri dan Ke-

jaksan Agung. "Padahal, Presiden punya hak dan wewenang untuk memerintahkan agar penyelesaian kasus Gayus dialihkan ke KPK," sesalnya.

Din juga merasa tak mendapatkan jawaban memuaskan tentang penyelesaian skandal dana talangan Bank Century. Presiden hanya berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Namun, tokoh lintas agama menilai mega skandal ini lambat dirampungkan.

Sebelumnya, tokoh lintas agama mengungkap 18 kebohongan pemerintah yang terdiri atas sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Di antara kebohongan ini menyangkut masalah penegakan hukum, kasus Gayus, kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi.

Sekretaris Eksekutif KWI, Benny Susetyo, menegaskan, pemerintah mestinya bersyukur karena sudah diingatkan untuk berbuat nyata dan tak sekadar berwacana atau membela diri. "Tapi, harus dijawab dengan angka-angka." Karena itu, tokoh lintas agama berharap pemerintah serius dan mengambil langkah-langkah penyelesaian yang terukur. "Misalnya, untuk kasus Gayus, itu bisa diselesaikan dalam berapapun bulan. Kalau waktunya terlewat, Kapolri dicopot. Jadi, harus ada parameter yang jelas dan terukur."

Namun, juru bicara kepresidenan, Julian A Pasha, membantah ketidakseriusan sikap pemerintah. Presiden, katanya, menanggapi semua catatan yang diberikan tokoh agama. Tetapi, Presiden memahami catatan itu tidak bersifat final.

Dalam dialog ini, Julian mengungkapkan, tokoh lintas agama tidak menyampaikan 18 kebohongan pemerintah. Mereka hanya menyampaikan tujuh catatan yang dibacakan Din dan dianggapnya tidak mewakili kepentingan seluruh tokoh agama. "Sebagian pemuka agama merasa apa yang disampaikan Pak Din itu tidak mewakili semua pemuka agama. Terjadi perbedaan pandangan," ungkapnya.

Kemarin, di sejumlah titik di Ibu Kota terpasang spanduk menghujat Din, seperti terlihat di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan. Spanduk itu bertuliskan 'Din Syamsuddin Ingin Indonesia Chaos', yang dibuat oleh Gerakan Anti Din Syamsuddin (GADIS).

■ m ikhsan shiddiq/rahmat santosa b/rosyid nurul hakim/nashih nasrullah ed: budi raharjo

## Polri Dalam 44 Perusahaan Terkait Gayus

Bilal Ramadhan, Muhammad Hafli

JAKARTA — Instruksi presiden (inpres) yang berisi 12 perintah untuk mempercepat penuntasan kasus Gayus HP Tambunan ditindaklanjuti Polri dengan penerbitan surat perintah khusus. Dalam surat perintah itu, Kapolri akan mengumpulkan jajaran Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) untuk penuntasan segala aspek dari kasus mafia hukum dan mafia pajak itu.

"Bareskrim telah mempersiapkan tim untuk membantu penuntasan tindak pidana korupsi kasus Gayus," kata Ke-

pala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Selasa (18/1). Selain tim Bareskrim, jajaran Polda Metro Jaya juga akan ditunjuk untuk membantu penyidikan.

Mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus, kini sedang disidang dalam perkara mafia kasus. Polri baru memulai penyelidikan untuk kasus Gayus yang bernuansa mafia pajak. Kementerian Keuangan telah memberikan dokumen 151 perusahaan yang kasus pajaknya pernah ditangani Gayus kepada Polri, Sabtu (15/1) lalu.

Penyidik Polri masih akan meminta beberapa dokumen lagi terkait 151 wa-

jib pajak itu, khususnya dokumen saat Gayus dalam posisi sebagai pejabat penelaah keberatan dan banding di Ditjen Pajak. Berdasarkan surat tugas yang ditunjukkan Polri, Gayus menangani sebanyak 44 dari 151 perusahaan secara langsung.

Karena itu, penyidik Polri akan memfokuskan penyelidikan terhadap dokumen wajib pajak 44 perusahaan tersebut. "Masih ada dokumen yang diperlukan, terutama kasus-kasus yang ditangani Gayus secara langsung," kata Boy.

Bersambung ke hlm 11 kol 1-4

## Melihat Nasib Pengungsi Merapi (Habis) Stres Memikirkan Kehidupan Masa Depan

Neni Ridarineni

Seorang remaja putri tampak duduk melamun di sebuah tempat tinggal sementara bagi pengungsi korban Gunung Merapi. Tatapan mata gadis berusia 15 tahun itu terlihat kosong. Sebut saja nama gadis itu Anik.

Sejak tinggal di pengungsian yang berada di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Anik yang tadinya piarung kini menjadi pendiam. Siswi SMP ini pun tak lagi bersekolah. Sehari-hari, dia hanya menghabiskan waktu dengan duduk-duduk atau tiduran di dalam selter yang dihuni bersama kedua orang tua dan kakaknya.

Masih di lokasi yang sama, seorang ibu juga terlihat kerap menyendiri dan meratapi nasibnya. Di benaknya masih teringat jelas rekaman kejadian saat rumahnya, dalam sekejap, hilang terseret arus banjir lahar dingin materi vulkanis Merapi yang melintasi Kali Putih, dua pekan lalu.

Kala itu, dia hanya bisa menangis sejadi-jadinya hingga pingsan menghampiri dirinya. Anik dan ibu itu sama-sama merasakan kekecewaan yang mendalam. Keduanya memikirkan kehidupannya yang tak lagi sama setelah didera amuk Merapi.

Mereka yang bisa dikatakan mengalami gangguan jiwa rupanya

trending news

terbilang banyak. Mereka tersebar di sejumlah titik pengungsian atau selter. Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga akhir Desember 2010, korban Merapi yang mengalami gangguan jiwa saja sekitar 756 orang.

Ini baru di satu kabupaten. Belum lagi di Kabupaten Magelang, Klaten, atau Boyolali, yang letaknya mengelilingi Merapi dan ikut terpapar bencana.

Gangguan jiwa yang diderita pengungsi itu beragam, mulai dari yang ringan hingga kelas berat. Dari 756 orang itu ditemukan 52 di an-



● Korban erupsi Merapi di pengungsian.

Bersambung ke hlm 11 kol 1-7

## hikmah

Oleh Fahmi Salim

### Kebohongan Publik

Akhir-akhir ini kata 'bohong', apalagi dikaitkan dengan 'publik' sangat sensitif dan bisa jadi mengundang kemarahan pihak yang tertuduh melakukannya.

Dusta dan bohong adalah salah satu sifat tercela yang wajib dihindari oleh setiap Muslim. Rasul SAW bersabda, "Sungguh kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Seseorang yang selalu berkata benar (jujur), ia akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang selalu berkata benar. Dan sungguh kebohongan mengantarkan kepada kedurhakaan dan kedurhakaan akan meng-

antarkan ke neraka. Seseorang yang selalu berbohong, ia akan selalu ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong." (HR Bukhari-Muslim).

Sedemikian pentingnya berkata benar dan tidak bohong, baik menyangkut urusan personal apalagi publik, Rasul selalu mengaitkannya dengan sikap beragama yang benar. Anas bin Malik berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan khutbah kepada kami kecuali beliau selalu bersabda: Tidak sempurna iman seseorang yang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak bisa menepati janjinya." (HR

Ahmad dan Ibnu Hibban).

Dalam fikih jual-beli, yang ada kontrak antara penjual dan pembeli, dikenal konsep 'khiyar', yaitu kebebasan memilih selama keduanya belum berpisah. Rasul pun menjelaskan, "Jika keduanya jujur dan jelas, jual beli mereka diberkahi. Namun, jika keduanya menyembunyikan (sesuatu) dan ber-

bohong maka dicabut keberkahan dari kontrak mereka." (HR Bukhari). Hemat saya, hadis tersebut juga berimplikasi nyata pada konteks politik dan kemaslahatan publik.

Bukankah esensi politik adanya kontrak (baiat) antara pemilih dalam hal ini rakyat dan pemimpin yang terpilih? Maka dalam hal ini,

prinsip 'khiyar' pun berlaku dalam konteks relasi kekuasaan. Artinya, jika rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak puas dengan kinerja pemimpin yang dipilihnya, mereka berhak menarik mandat politik si pemimpin selaku mandataris.

Sebaliknya, jika pemimpin merasa tidak lagi dipercaya oleh rakyat yang memberinya mandat, langkah yang baik adalah mundur dan mengembalikan mandatnya kepada rakyat. Dengan sikap itu, diharapkan keberkahan akan selalu menaungi negeri dan bangsa ini.

Jika tak ingin dicabut mandatnya, setiap pemimpin mesti memiliki political will untuk memimpin

dengan kejujuran, satu kata satu perbuatan. Imam al-Mawardi (wafat 450 H), seorang ahli tata negara Islam, menulis dalam kitab Adabud Dunya wad Din, "Pengusaha adalah imam yang diikuti, dan perilakunya harus menjadi contoh yang baik. Jika dia zalim, jangan harap aparat di bawahnya bisa adil, dan jika dia adil maka tak ada seorang pun aparatnya yang berani zalim. Doa pemimpin saleh adalah doa yang paling mungkin terakumulasi oleh Allah, dan perbuatan baik yang paling prioritas mendapatkan pahala adalah putusan pemimpin yang benar dalam mengelola kemaslahatan publik." Wallahu A'lam. ■